

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT LARANGAN
PERNIKAHAN *NGELANGKAH DALAN*
(Studi kasus di Desa Tanjung Jaya Kel Sidomulyo
Kec Air Nanningan Kab Tanggamus)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah

Oleh:

Agung Budianto
NPM : 1621010198

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H /2021 M**

**TINJAUAN H UKUM ISLAM TERHADAP ADAT LARANGAN
PERNIKAHAN *NGELANGKAH DALAN*
(Studi kasus di Desa Tanjung Jaya Kel Sidomulyo
Kec Air Naningan Kab Tanggamus)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah

Oleh:

Agung Budianto
NPM : 1621010198

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah

Pembimbing 1 : Dr.Hj.Linda Firdawati, S.H.I, M.Ag

Pembimbing 2 : Arif Fikri, S.H.I, M.Ag

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H /2021 M**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik Adat larangan pernikahan *ngelengkah dalam* pada masyarakat Adat Jawa Desa Tanjung Jaya Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus yang bermayoritas beragama Islam dan masih memegang teguh Adat serta Budayanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologi dengan menggunakan pendekatan studi kasus dalam hal ini dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat Desa Tanjung Jaya tentang bagaimana praktik Adat larangan menikah *ngelengkah dalam* serta untuk mendapatkan informasi-informasi lain yang diperlukan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara dan pengamatan. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai praktik Adat larangan menikah *ngelengkah dalam*, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan data penunjang lainnya yang diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi, dan monografi desa semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan Adat larangan menikah *ngelengkah dalam* di Desa Tanjung Jaya Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya Adat larangan menikah *ngelengkah dalam* sudah menjadi kepercayaan masyarakat Desa Tanjung Jaya sejak zaman dahulu. Walaupun seluruh masyarakat Desa Tanjung Jaya Pekon Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus memeluk agama Islam, namun sebagian besar masyarakat masih khawatir dan mempercayai Adat tersebut sehingga masih banyak lagi pertimbangan sebelum melaksanakan sebuah pernikahan atau perjudohan. Beberapa responden dari masyarakat juga sepakat bahwa Adat larangan menikah *ngelengkah dalam* bertentangan dengan ajaran Islam khususnya para tokoh agama di Desa Tanjung Jaya. Dalam pandangan hukum Islam berdasarkan 'Urf, Adat larangan menikah *ngelengkah dalam* termasuk ke dalam *Al-'Urf fasid* atau adat kebiasaan yang buruk dan tidak bisa dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam.

Kata kunci: Hukum Islam, *Ngelengkah Dalam*, Pernikahan

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Agung Budianto
NPM : 162101098
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT LARANGAN PERNIKAHAN *NGELANGKAH DALAN* (Studi kasus di Desa Tanjung Jaya Kel Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat permohonan yang saya buat ini agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2021

Penulis

AGUNG BUDIANTO

NPM : 162101098



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT LARANGAN
PERNIKAHAN NGELENKAH DALAN (Studi kasus di Desa Tanjung Jaya
Pekon Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus)
Nama : Agung Budianto
NPM : 162101098
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Al- Ahwal Al- Syakhsiiyyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI


Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqsyah

Fakultas Syariah

UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hi. Linda Firdawati, S.Ag, M.H
NIP. 197112041997032001


Anif Fikri, M.Ag
NIP.

Kepala Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah


H. Rohmat, S.Ag, M.H.I
NIP: 1974092020031221003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukaramo Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT LARANGAN PERNIKAHAN *NGELANGKAH* DALAM** (Studi kasus di Desa Tanjung Jaya Kel Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus)”. Disusun oleh Agung Budianto NPM : 1621010198, program studi Hukum Keluarga Islam. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

Tim Penguji

Ketua : H. Rohmat, S.Ag, M.H.I . (.....)

Sekertaris : Hasanuddin Muhammad, M.H (.....)

Penguji I : Dr.Abdul Qodir Zaelani, M.A (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag, M.H (.....)

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I, M.Ag (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag, M.H

NID 07208262003121002

MOTTO

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. SR-Rum : 21)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin pertama-tama puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Karya tulis ini, penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu membantu dan mendukung atas terselesainya karya tulis ilmiah ini.

1. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Suwito dan Ibu Mujiatun yang paling tersayang, terima kasih telah memberikan kasih sayang kepada anakmu ini yang tak ternilai dan tidak bisa dihitung mulai dari lahir hingga saat ini, berkat kalian yang tidak putus selalu berdoa, memotivasi untuk anakmu ini, dimata penulis kalian adalah sebuah hal terindah yang pernah ada, tidak ada satupun makhluk di bumi saat ini yang memberikan kasih sayang kepadaku melebihi kasih sayang yang kalian berikan, kasih sayang kalian yang begitu tulus membuat semangat bagi penulis sehingga tidak lagi malas dan dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini. Karena sesungguhnya ridha Allah terletak pada ridhanya kedua orangtua.
2. Kepada Kakak-kakakku tercinta Mansuryadi, Yulistari, dan Ratnawati terima kasih sudah membantu walaupun sesekali kesal karena saya malas untuk mengerjakan dan segera menyelesaikan skripsi ini, sekali lagi terima kasih atas doa dan kasih sayangnya yang telah diberikan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Agung Budianto, penulis dilahirkan di Desa Tanjung Jaya Pekon Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus pada tanggal 17 Juli 1997 pada hari Kamis. Setelah dilahirkan penulis dibesarkan di Desa Tanjung Jaya, Desa yang kecil jauh dari perkotaan namun tenang dan sejuk membuat kenyamanan yang tersendiri. Penulis merupakan anak bungsu atau anak ke empat dari tiga bersaudara, kakak pertama penulis bernama Ratnawati, kakak ke dua bernama Mansuryadi, kakak ke tiga bernama Yulistari. Penulis mengawali pendidikan pada:

1. Sekolah Dasar (SD) Negri 1 Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus, yang dimulai pada tahun 2004 dan selesai tahun 2010
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP 1) Pulau Panggung, Kec Pulau Panggung Kab Tanggamus, yang dimulai pada tahun 2010 dan selesai tahun 2013. Penulis tinggal bersama kakak ke dua.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA 1) Talang Padang Kec Talang Padang Kab Tanggamus, yang dimulai pada tahun 2013 dan selesai tahun 2016. Penulis masih ikut tinggal bersama kakak ke dua. Pada tahun 2016 penulis masuk dan terdaftar sebagai Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah prodi Hukum Keluarga (AL-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT LARANGAN PERNIKAHAN NGELANGKAH DALAN”**. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program strata satu (SI) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Pro f. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. yang senantiasa memberikan wawasan serta mengembangkan ilmu-ilmu Syariah dan Hukum.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag, M.H.I. Selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syaksiyyah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A Selaku Sekertaris Prodi Ahwal Al-Syaksiyyah UIN Raden Intan Lampung.
5. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag, M.H dan Bapak Arif Fikri, M.Ag. Selaku pembimbing 1 dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen, para staf karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak, Ibu, Kakak dan seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakanku agar cepat menyelesaikan skripsi ini walaupun hari-hari kedua orangtuaku selalu mengomel dan tidak bosan bertanya tentang kapan skripsi selesai. Menurutku itu merupakan

bentuk kasih sayang sehingga penulis semangat memberikan yang terbaik.

8. Kepada para narasumber yang membantu memberikan informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan demi memperlancar proses skripsi.
9. Kepada seluruh teman-teman dan sahabat kelas AS B yang selalu menemani selama perkuliahan dan Adik tingkat sewaktu mengulang matakuliah.
10. Kepada para sahabat yang selalu menemani dan membantu Sapitri, Reno, wibi, Rama, Aji, Solihin dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satupersatu.
11. Kepada teman-teman kampung yang sudah meluangkan waktu untuk bermain melepaskan lelah setelah mengerjakan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu oleh penulis namun telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ini penulis ber-terima kasih banyak dari lubuk hati yang paling dalam dan tidak lupa penulis selalu panjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga amal bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita semua. Dan akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukan sewaktu-waktu ada yang ingin membacanya.

Bandar Lampung, Juni 2021

Agung Budianto
NPM 162101098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Juduul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	15
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	20
3. Pernikahan yang di Haramkan.....	29
4. Perempuan yang haram Untuk dinikahi	38
5. Tujuan dan hikmah Pernikahan	44
B. Pernikahan Dalam Adat Jawa	49
1. Pengertian Pernikahan dalam Adat Jawa	49

2. Larangan atau Pantangan Menikah dalam Tradisi Jawa.....	51
3. Tradisi Kepercayaan Masyarakat Adat Jawa.....	54
C. Adat istiadat (' <i>Urf</i>) dalam Hukum Islam	61
1. Pengertian Adat Istiadat (' <i>Urf</i>).....	61
2. Macam-Macam Adat (' <i>Urf</i>)	62
3. Kehujjahan Adat (' <i>Urf</i>) dan Peranannya dalam Hukum Islam	63

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
1. Sejarah singkat Desa Tanjung Jaya	65
2. Kondisi Geografis dan Demografis desa Tanjung Jaya .	66
3. Sosial Budaya dan Nilai nilai Agama desa Tanjung Jaya.....	68
B. Praktik Adat Larangan Pernikahan <i>Ngelengkah Dalam</i> di Desa Tanjung Jaya Pekon Sidomulyo Kec. Air Naningan Kab Tanggamus	71

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Larangan <i>Menikah Ngelengkah Dalam</i> Desa Tanjung Jaya Pekon Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus.....	81
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Menikah <i>Ngelengkah Dalam</i> Desa Tanjung Jaya Pekon Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus	84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	89
B. Rekomendasi	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Pekon Sidomulyo Berdasarkan Jenis Kelamin.....	68
Tabel 2. Bangunan Sarana Peribadatan	68
Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk Pekon Sidomulyo.....	69
Tabel 4. Agama Penduduk Pekon Sidomulyo	69
Tabel 5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Pekon Sidomulyo	70
Tabel 6. Struktur Aparatur Pekon Sidomulyo	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apa lagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini.

Penelitian yang akan penulis lakukan ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT LARANGAN PERNIKAHAN NGELANGKAH DALAN”**(Studi di Desa Tanjung Jaya Kel Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus)” adapun beberapa yang perlu penulis uraikan sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau, pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹ Dengan kata lain tinjauan adalah menyelidiki atau mempelajari terhadap objek penelitian.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama umat Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupan.²

3. Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 529.

² Mahmud Syaltut, *Al-Islam aqidat wa Syari'at*, Kairo: Dar al-Qalam, Cet III, 1966, 12.

menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat.³

4. *Ngelengkah dalam*

Ngelengkah dalam berasal dari bahasa Jawa yang berarti menyebrangi jalan, berseberangan tempat tinggal, berposisi berseberangan jalan di dalam satu Desa.⁴

5. Adat

Adat berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang dan diikuti masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu kelompok.⁵

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Tanjung Jaya Kel Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan meninjau bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah *ngelengkah dalam* pada masyarakat Jawa dan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan *ngelengkah dalam* ini.

B. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan kebahagiaan, salah satunya adalah memiliki pasangan hidup, di mana akan menjadikan pasangannya sebagai salah satu pelengkap hidupnya, pernikahan adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari

³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang, Dina Utama,Cit. I,1993), 130.

⁴ Tukiman Tokoh Adat di Desa Tanjung Jaya

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011) ,4.

aturan-aturan agama, pernikahan bukan semata - mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, kebahagiaan, dan saling mengayomi di antara suami istri dan dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Seperti Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat Ar Ruum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah. Menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang meliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.⁶

Perkawinan merupakan langkah - langkah awal yang menentukan dalam proses membentuk keluarga bahagia dan harmonis. Di samping itu perkawinan bagi pasangan muda-mudi adalah melakukan pengintegrasian manusia dalam tatanan hidup bermasyarakat. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, oleh sebab itu Islam memberikan wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut dalam serangkaian aturan hukum.

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga dengan jelas menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri

⁶ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990), cet ke IV, 14-15.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.⁷ Oleh karena itu, perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan baik mental maupun material.

Tidak lepas dari semua itu berkaitan dengan kesiapan mental seseorang untuk menjalani kehidupan berumah tangga, yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan seseorang menempatkan dirinya dalam suatu komunitas masyarakat yang ditempatinya, yang tentunya akan terikat pula dengan tatanan sosial budaya yang berlaku.

Sistem sosial suatu kebudayaan dari unsur agama atau religi mewujudkan diri dalam bentuk berbagai upacara. Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak di temukan pelaksanaan atau praktek perkawinan yang berbeda-beda di kalangan umat Islam. Perbedaan tersebut terjadi karena faktor pemahaman terhadap agama yang berbeda, adat istiadat dan budaya.

Dalam realitas tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku yang satu berbeda dengan suku yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama lain, begitu juga terdapat perbedaan adat perkawinan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa.⁸

Adat adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum adat akan lebih sulit dan kuat karena pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sangsi sesuai peraturan yang berlaku dan dipatuhi dalam komunitas tersebut. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Desa Tanjung Jaya Kel Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus, apabila ada laki-laki dan perempuan yang akan

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Grapika press, 2012), 2.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet ke-4, (Bandung: Aditiya Bakti, 1990), 12

menikah dan mereka bertempat tinggal satu desa dan posisi rumah mereka bersebrangan berada pojok dalam istilah Jawa *ngelengkah dalan* maka pernikahan itu dilarang untuk dilaksanakan, karena masyarakat Jawa mempercayai jika tetap dilaksanakan pernikahan itu maka akan terjadi suatu musibah pada keluarga tersebut, musibah yang akan menimpa keluarga tersebut adalah akan ada yang kalah dari salah satu pihak keluarga pasangan itu, baik secara ekonomi maupun mental, akan terjadi perpisahan antara pasangan suami istri tersebut, berpisah meninggal atau berpisah bercerai.⁹ Namun jika pernikahan tersebut tetap ingin dilaksanakan masyarakat Jawa memiliki syarat yang harus dilakukan meskipun itu dinilai masih kurang efektif agar terhindar dari kesialan, syarat yang harus dilakukan yaitu *diguwak* yang berarti dibuang, pembuangan salah satu pasangan itu dimaksudkan agar posisi rumah mereka tidak lagi bersebrangan.

Di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus masih banyak yang mempercayai mitos tersebut. Melihat dari permasalahan di atas penulis menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut bagaimana hukum Islam menyikapi permasalahan hukum adat tersebut dan penulis tertarik untuk mengangkat kasus yang terjadi di Kel Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus. Di mana jika seseorang ingin menikah tetapi posisi rumah mereka bersebrangan berada pojok itu dilarang untuk melaksanakan pernikahan. Untuk meneliti kasus tersebut penulis memberikan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN NGELANGKAH DALAN” (Studi kasus di Desa Tanjung Jaya Pekon Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus)**”.

⁹ Wawancara dengan pak Tukiman, Tokoh Masyarakat Sidomulyo, Air Naningan, Tanggamus, Lampung, tanggal 24 Agustus 2020.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Melihat Latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini lebih berfokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Pernikahan *ngelangkah dalam* di desa Tanjung Jaya Pekon Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus.

Sedangkan sub fokus penelitian ini adalah tentang tradisi adat larangan pernikahan *Ngelangkah Dalam*, bagaimana praktik adat larangan menikah *Ngelangkah Dalam*, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang adat larangan pernikahan *Ngelangkah Dalam* di desa Tanjung Jaya Pekon Sidomulyo Kec Air Naningan Kab. Tanggamus.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik adat larangan menikah *ngelangkah dalam* di Desa Tanjung Jaya Pekon Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang larangan menikah *ngelangkah dalam* di desa Tanjung Jaya Pekon Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus?

E. Tujuan

- a. Untuk mengetahui praktik adat larangan menikah *ngelangkah dalam* di Desa Tanjung Jaya Pekon Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang larangan menikah *ngelangkah dalam* di Desa Tanjung Jaya Pekon Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus.

F. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan keilmuan khususnya berkaitan dengan hukum Adat. Penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada masyarakat mengenai apa itu adat larangan pernikahan *Ngelangkah Dalam*.

b. Secara praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah wawasan keilmuan tentang adat larangan menikah *Ngelengkah Dalan* pada masyarakat desa Tanjung Jaya.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran dalam melestarikan adat budaya yang ada di masyarakat.
- 3) Menginformasikan masalah- masalah yang timbul dalam masyarakat mengenai hukum Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Masalah yang berkaitan dengan Larangan Menikah Satu Desa *Ngelengkah Dalan* bukanlah masalah yang baru untuk diangkat penyusunan skripsi atau karya ilmiah sebelumnya sudah ada yang membahas tentang Larangan Menikah Satu Desa *Ngelengkah Dalan* :

Skripsi yang disusun oleh Rohmatun Eka Puji Lestari yang berjudul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelangkahan Dalam Pernikahan di Dusun 03 Astomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah”¹⁰. Skripsi ini menjelaskan tentang perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun 03 Astomulyo masih menjunjung tinggi adat Jawa, secara tidak langsung menekankan kepada calon mempelai untuk diwajibkan meminta izin kepada kakak yang akan dilangkahnya. Calon mempelai tersebut memberikan hadiah berupa barang atau uang yang diberikan kepada saudara/saudari pemberian tersebut bersifat wajib. Masyarakat dusun III Astomulyo masih memegang teguh tradisi tersebut, persoalan yang berhubungan dengan adat tidak diatur secara jelas dan tegas, hal ini merupakan tradisi dari suatu daerah. Skripsi ini dan skripsi yang disusun oleh peneliti sama-sama membahas tentang kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang sejak lama. Namun skripsi yang disusun oleh Rohmatun Eka Puji Lestari lebih menekankan terhadap tradisi pelangkahan yang tentunya calon mempelai diwajibkan memberikan hadiah kepada saudara/saudari yang di atasnya dan yang belum menikah,

¹⁰ Rohmatun Eka Puji Lestari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelangkahan dalam Pernikahan”, (Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2015)

sedangkan skripsi yang disusun oleh peneliti mengedepankan pada pantangan menikah jika posisi rumah mempelai bersebrangan jalan.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Isro'I yang berjudul "Larangan Menikah Pada Bulan Muharram dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Bangkok Kecamatan Karang Gede Kabupaten Boyolali".¹¹ Penelitian ini menjelaskan tentang masyarakat setempat yang menganggap sangat sakral dan tabu untuk melaksanakan perkawinan oleh masyarakat Jawa. Skripsi tersebut lebih menekankan pada faktor yang mendorong alasan masyarakat tidak melakukan pernikahan pada bulan Muharram. Skripsi ini lebih menekankan kepada Al-Qur'an dan Hadist.

Skripsi yang disusun oleh Wira Kurniawan yang berjudul: "Kawin Mulang Muakhi Adat Lampung ditinjau dari Hukum Islam."¹² Skripsi ini menjelaskan tentang pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung yang masih mempunyai hubungan kekerabatan, yang masih banyak kekeliruan antara yang boleh untuk dinikahi dan yang tidak boleh dinikahi. Persamaan dengan skripsi yang disusun oleh peneliti adalah membahas tentang adat dalam pernikahan hanya saja yang disusun oleh Wira Kurniawan lebih menekankan kepada hubungan kekerabatan antara yang boleh dinikahi dan yang tidak, sedangkan skripsi yang disusun oleh peneliti lebih menekankan terhadap letak geografis tempat tinggal dari calon mempelai yang boleh untuk menikah atau tidak. masyarakat percaya kesialan akan menimpa mereka jika tetap ingin melangsungkan pernikahan yang posisi rumah mereka bersebrangan jalan.

¹¹ Muhammad Isro'i, "Larangan Menikah pada Bulan Muharram dalam Adat Jawa perspektif Hukum Islam" (STAIN Salatiga)

¹² Wira Kurniawan, "Kawin Mulang Muakhi Adat Lampung di Tinjau dari Hukum Islam", (Metro: Perpustakaan IAIN Metro)

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data.¹³ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui. Sedangkan menurut kartini kartono, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu status metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana fenomena adat larangan menikah Ngelengkah Dalam pada masyarakat Jawa di Desa Tanjung Jaya Pekon Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus yang kemudian dianalisis untuk di cari hukumnya menurut ketentuan Islam.

¹³ Kartini Kartoni, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ket;VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 15.

2. Jenis Data

Ada pun jenis data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. penelitian ini Berupa informasi-informasi hasil dari wawancara dengan masyarakat Desa Tanjung Jaya Pekon Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus tentang adat larangan menikah Ngelengkah Dalan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli. Data sekunder dalam penelitian ini sebagai pelengkap dari data primer yang diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan, buku, majalah, koran, artikel, serta dokumen-dokumen terdahulu atau disebut juga data tersedia yang berhubungan dengan adat larangan menikah Ngelengkah Dalan pada msyarakat Jawa yang kemudian di olah oleh peneliti.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah seluruh objek (orang, penduduk, kelompok) yang akan diselidiki dan diteliti. Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh masyarakat adat Jawa yang melakukan adat larangan menikah Ngelengkah Dalan yang ada di Desa Tanjung Jaya Kel Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dalam hal ini sampel yang digunakan

adalah *purposive sampling* yaitu data *purposive sampling* memiliki kelompok subjek didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkutan yang erat dengan ciri-ciri atau dengan sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁴

Berdasarkan orang yang mengetahui tentang adat larangan menikah *ngelangkah dalam* kriteria diatas maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap informan lainnya yaitu 1 orang tokoh Adat, 2 orang tokoh Agama, dan 4 tokoh Masyarakat di Desa Tanjung Jaya Kel Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus. Oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian populasi yang dianggap representatif dan menjawab setiap permasalahan yang tengah dihadapi sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literature maupun data yang dihasilkan dari data empiris. Penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu peristiwa pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interview*).¹⁶ Ini untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data untuk mengetahui secara detail adat larangan menikah

¹⁴ Nurul Zuriyah, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*, I (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007), 116.

¹⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1996), .104.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), 124.

Ngelengkah Dalam pada masyarakat Jawa di Desa Tanjung Jaya Kel Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara (*interview*) dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

b. Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan, untuk meneliti khususnya yang berhubungan dengan adat larangan pernikahan Ngelengkah dalam pada masyarakat di desa Tajung Jaya Pekon Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang digunakan untuk menyempurnakan data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai variable berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu yang berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen tertulis.¹⁷ Dokumentasi juga dapat didapatkan dari foto, rekaman suara, arsip desa dan sumber - sumber lain yang terkait dengan tema penelitian untuk kelengkapan dalam objek penelitian, yaitu adat larangan menikah Ngelengkah Dalam pada masyarakat di Desa Tanjung Jaya Kel Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

¹⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987), 140.

- a. Pemeriksaan data (*editing*) mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
 - b. Penandaan data (*coding*) memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, literature, peraturan dalam ilmu kedokteran, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama, masalah kedua B dan seterusnya).
 - c. Rekontruksi data (*reconstructing*) menyusun ulang data secara terarur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
 - d. Sistematisasi data (*systematizing*) penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
6. Teknik Menganalisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yang berarti upaya sistematis penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu. Dalam analisis kualitatif digunakan metode deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan dengan pengetahuan umum mengenai kejadian yang khusus atau dengan cara menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus, dengan menggunakan penalaran atau rasio.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, signifikasi penelitian, fokus penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, sistematika Penelitian dan metode penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Memuat tentang kerangka teori relevan yang terkait dengan tema skripsi yaitu tentang pernikahan, pernikahan dalam adat Jawa, tradisi kepercayaan masyarakat Jawa, dan teori *Urf*.

BAB III. LAPORAN PENELITIAN

Memuat secara rinci lokasi penelitian, sejarah singkat, kondisi geografis dan demografis, sosial budaya dan nilai agama serta laporan hasil penelitian peneliti, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan atau fokus penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA

Berisi hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan sesuai dengan rumusan masalah atau fokus penelitiannya.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Rekomendasi diarahkan pada dua hal, yaitu :

- 1) Rekomendasi untuk masyarakat agar lebih selektif lagi dalam menyikapi sesuatu hal.
- 2) Rekomendasi untuk para tokoh agar bisa menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan menurut Islam adalah suatu hal yang sangat penting dan utama, karena melalui ikatan inilah seorang laki-laki dan seorang wanita membentuk wadah yang disebut keluarga, denganya mereka dapat menemukan kebahagiaan, ketenangan, serta cinta dan kasih sayang, suatu keluarga yang terintegrasi antara rumah tangga dan iman. Melalui ikatan perkawinan manusia dapat saling mengasihi, menjalin hubungan kekeluargaan dan meneruskan keturunan.¹⁸

Pernikahan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya antara laki-laki dan perempuan,¹⁹ dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.²⁰

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya.

Pernikahan dalam literatur Fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu Nikah dan *Jawaz*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kata

¹⁸ Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Pres, 1993), 7.

¹⁹ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), 8.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi jilid 9 cet.10*, (Damaskus : Darul Fikr, 2007), 48.

NaKaHa banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti Kawin²¹.

Seperti dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.(QS. An-nur : 32)

Sementara itu dalam arti terminology dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. dikalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang bisa dipakai adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *Nakaha* atau *Jawaza*.²²

Ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang disebutkan ulama terdahulu, diantaranya disebutkan oleh Dr. ahmad Ghandur dalam bukunya *Al-Akhwat Al-Syakhsyah fi Al-Tasyri' al-Islamy* : akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntuna naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.

Sementara itu dalam UU no 1 tahun 1974 Pasal 1: “perkawinan ialah ikata lahir batin antar seorang pria dan

²¹ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*35.

²² Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* 37

seorang wanita sbagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²³

Dasar disyariatkana perkawinan terdapat firman Allah dalam Al-Qur'an, diantaranya QS. Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS: Ar-rum : 21)

Berdasarkan ayat diatas, bahwa perkawinan memang mempunyai dasar hukum yang bersumber dari firman Allah SWT yaitu Al-qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, jelas bahwa Islam mensariatkan adanya perkawinan yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud RA yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

“Dari Abdullah Ibn Mas'ud berkata: Rasululah telah bersabda kepada kami; Wahai para pemuda, barangsiapa

²³ Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentaang Perkawinan , 8.

diantara kalian yang mampu menikah, maka menkahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menekan hawa nafsu” (Muttafaqun ‘Alaih)²⁴

Sebagai umat yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka menurut adanya kepatuhan, rasa cinta dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah bersumber dari dalil Al-qur’an surat An-nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS An-nahl : 72)

Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa perintah atau anjuran menikah adalah perintah Allah dan menjadikan sesuatu itu dengan berpasang-pasangan, dengan adanya perkawinan maka Allah akan memberikan rizki atau karunia kepada manusia yang dianggap baik untuk menerimanya.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan dalam memilih laki-laki untuk pasangan

²⁴ Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, terjemah Izzudin Karimi (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), 398.

hidupnya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدُكَ (رواه الجماعة الاثرمدى)

“Dari Abi Hurairah r.a, Nabi SAW . beliau bersabda:Nikahilah wanita (dengan memperhatikan) empat faktor, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah yang beragama, mudah-mudahan engkau akan berhasil baik.(H.R. Jamaah selain Turmudzi)”²⁵.

Yang dimaksud agama di sini adalah kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya, ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar. Dari hadis diatas adanya kebolehan seseorang untuk menikah dengan melihat dari latar belakang kekayaan pasanganya tetapi itu bukanlah anjuran yang utama dianjurkan oleh Rasulullah.

Segolongan Fuqoha yakni jumhur berpedapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnah*. Golongan *Zahiriyah* berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian untuk sebagian orang, *sunnah* untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan lainnya. Demikian menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Ulama Syafi’I mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping adanya *sunnah*, wajib, haram dan makruh.²⁶

- a. Fardu, hukum nikah fardu pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah yakni biaya nafkah dan biaya mahar dan adanya percya diri bahwa dia dapat

²⁵ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Syarah Riyadhhus Shalihin jilid II*, terjemahan Asmuni (Bekasi: PT Darul Falah, 2013), 299.

²⁶ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 18.

- mengakui keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik.
- b. Wajib, hukum wajib menikah bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinahan apabila tidak menikah.
 - c. Haram, hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika ia menikah.
 - d. Makruh, nikah makruh bagi orang yang dalam kondisi campuran. seseorang mempunyai kemampuan serta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ketingkat yakin.²⁷

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

1. Pengertian Rukun dan syarat Pernikahan

a. Rukun

Rukun dalam bahasa arab bermakna sudut pada ruangan, tiang, penyangga, dan penegak bangunan. Dan kadang secara bahasa rukun bermakna *sisi yang lebih kuat dari perkara yang utama*, sedangkan secara istilah rukun sering didefinisikan sebagai *apa yang membuat sesuatu tidak akan ada kecuali denganya*.

Maksudnya adalah bahwa yang disebut sebagai rukun adalah pokok dari sesuatu, dimana sesuatu itu menjadi tidak ada apabila rukunya tidak terdapat. Maka yang dimaksud rukun nikah adalah bagian-bagian utama dalam suatu akad nikah, yang apabila bagian utama itu tidak terdapat, maka perkawinan itu menjadi tidak sah.

²⁷ Abdulaziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amza, 2009), 46.

Rukun menurut ulama hanafiyah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian dalam esensinya. Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu, sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan denganya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada.²⁸ Perbedaan pendapat dalam menetapkan rukun dikalangan para ulama:

Mazhab Al- Hanafiyah

Dalam pandangan mazhab Hanafiyah hanya ada satu saja Ijab Qabul atau akad nikah itu sendiri

Mazhab Al-Malikiyah

Menurut mazhab malikiyah rukun nikah itu ada 3 perkara, yaitu

- 1) Wali nikah
- 2) *Mahallunnikah* yaitu suami istri
- 3) *Sighah* atau ijab qobul

Mazhab As-Syafi'iyah

Dalam Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling banyak menyebutkn rukun nikah yaitu 4

- 1) *Sighah*
- 2) Suami dan Istri
- 3) Dua orang saksi
- 4) Wali

Mazhab Al-Hanabaliyah

Sedangkan mazhab Hanbali menyebutkan rukun nikah ada 3 perkara, yaitu

- 1) Pasangan suami istri
- 2) Ijab
- 3) Qobul

Adapun mahar atau mas kawin tidak termasuk kdalam rukun nikah, mengingat bahwa

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* jilid 9 cet.10, (Damaskus : Darul Fikr, 2007), 55.

Rasululah pernah menikahkan wanita, namun wanita itu melepaskan haknya atas mahar.²⁹

Macam-macam Rukun

1) Suami Isteri

Suami isteri sering disebut *az-zauzani* yaitu pasangan calon suami dan istri *Mahhalul 'aqd*, kadang juga disebut *al-'aqidani* yaitu pihak-pihak yang terkait dengan akad yang dilangsungkan. Keberadaan suami dan istri oleh sebagian besar ulama menjad rukun dalam sebuah akad nikah, kecuali dalam pendapat Al-Hanafiyah.

Namun yang dimaksud keberadaan disini bukan berarti hadir dalam prosesi akad nikah. Yang dimaksud dengan keberadaa dsini adalah bahwa suami dan istri itu telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai calon pasangan suami istri yang sah.

2) Wali

Pengertian wali adalah orang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemashlahatan sendiri.³⁰

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam rukun

²⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8:Perkawinan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), 92.

³⁰ Mughniyah, Muhammad Jawaz, *Fiqh Lima Mazhab*, terjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Alkahf, (Jakarta: Lentera, 2004), 345.

perkawinan menurut kesepakatan para ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan juga dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk keberlangsungan perkawinan tersebut. Orang yang berhak jadi wali itu ada tiga kelompok:

- a) Wali nasab yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin.
- b) Wali *Mu'thiq* yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hambasahaya yang dimerdekakannya.
- c) Wali Hakim yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya menjadi pejabat hukum (hakim) atau penguasa.

Dalam menetapkan wali nasab terdapat beda pendapat dikalangan para ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari nabi, sedangkan Al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa yang berhak jadi wali.

3) Saksi

Akad perkawinan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari adanya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari. Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan, ulama jumhur berbeda pendapat, dari ulama Syafi'iyah dan Hanabalih menempatkan saksi kedalam rukun dalam perkawinan.³¹

³¹*Ibid*, 314.

Sementara ulama Hanafiyah dan Zhahiriyyah menempatkan saksi kedalam Syarat perkawinan. Demikian pula keadaan ulama malikiyah, tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi dalam akad perkawinan, yang diperlukan adalah memngumumkan namun diisyaratkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum bergaulnya.

Pendapat berbeda dengan jumhur ulama diatas adalah dari ulama Syi'ah Imamiyah, bagi mereka tidak ada keharusan adanya saksi waktu berlangsungnya akad perkawinan bahkan akad dapat berlangsung tanpa adanya saksi. Keberadaan saksi bagi mereka hukumnya adalah *Istihbab*, dianjurkan dan bukan merupakan kewajiban.

4) Ijab Kabul

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *Ijab* dan *Kabul*, *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *Kabul* adalah penerimaan dari pihak kedua.

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qaabul* antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikan seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.³²

b. Syarat

Sebagaimana di definsikan oleh Ibnu As-Subki syarat adalah segala hal yang mengakibatkan sesuatu menjadi tiada karena ketiadaanya. Dan sebaliknya,

³² *Ibid*, 309.

meski syarat itu ada, belum tentu sesuatu itu terwujud atau tidak terwujud secara dzatnya.

Syarat yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Definisi mudahnya contoh menutup aurat merupakan syarat sah nya sholat, maka apabila seseorang tidak menutup aurat maka tidak sah sholatnya. Tetapi apabila seseorang telah menutup auratnya tidak begitusaja sholatnya terlaksana. Terlaksana atau belum, tergantung pada shalat itu sudah dikerjakan atau belum, bukan tergantung ia sudah menutup aurat atau belum.

Ibnu Al-Hajib mendefinisikan syarat adalah *“segala hal yang ketiadaanya mengharukan sesuatu menjadi tidak ada, namun bukan karena hubungan sebab akibat”*. Definisi ini sama dengan definisi sebelumnya hanya disampaikan dengan redaksi yang berbeda. Kalau kita pakai contoh diatas, maka tidak menutup aurat membuat sholat itu tidak ada, alias tidak sah. Tapi dikatakan bukan hubungan sebab akibat, maksudnya meski tanpa menutup aurat shalat menjadi tidak sah, tetapi kalau ditutup bukan berarti sholat telah terlaksana. Syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Syarat bagi kedua mempelai

Adapun persyaratan dalam pernikahan sangat berhubungan erat dengan rukun-rukun nikah yaitu :

a) Syarat calon mempelai laki-laki yaitu:

- 1) Tidak ada hubungan mahram dari calon istri
- 2) Kemauan sendiri (merdeka)
- 3) Jelas identitasnya

- 4) Tidak sedang menjalankan ibadah ihram³³
- b) Syarat mempelai perempuan,yaitu:
 - 1) Tidak ada halangan *syar'i*.
 - 2) Tidak berstatus punya suami yang masih sah.
 - 3) Tidak hubungan mahram.
 - 4) Tidak dalam keadaan *iddah*.
 - 5) Kemauan sendiri (merdeka)
 - 6) Jelas identitasnya.
 - 7) Tidak sedang menjalankan *ihram*.
- 2) Syarat-syarat wali yaitu:
 - a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Sehat akalnya
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang ibadah ihram.³⁴
- 3) Syarat-syarat saksi yaitu:
 - a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Sehat akalnya
 - d) Adil
 - e) Mendengar dan melihat
 - f) Tidak dipaksa
 - g) Tidak sedang menjalankan ibadah ihram
 - h) Paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul.
- 4) Syarat ijab dan qabul.
 - a) Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakili, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang

³³ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017),16.

³⁴ *Ibid...*,16.

mewakilinya (dengan syarat yang ketat), keduanya harus *mumayyiz*.

- b) Dilangsungkan dalam satu majelis, kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.
- c) Keduanya tidak diperbolehkan kontradiksi. Misalnya, seorang wali apabila mengakad nikahkan putri A, maka, yang diterimakan dalam qabul harus putri A.
- d) Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi, maupun kedua mempelai.³⁵

c. Perbedaan rukun dan syarat

Sesungguhnya antara rukun dan syarat punya hubungan yang erat, yaitu bahwa keberadaan masing-masing sama-sama sangat menentukan sah atau tidak sahnya suatu amal. Suatu ibadah tidak akan sah bila satu dari sekian rukunnya tidak terpenuhi, demikian juga bila kurang disalah satu syarat nya juga tidak sah.

Tetapi antara rukun dan syarat juga punya perbedaan yang prinsipil, meski sangat tipis. Sehingga para ulama seringkali berbeda pendapat tentang apakah suatu amal termasuk kedalam daftar rukun atau kedalam daftar syarat .

Perbedaan yang asasi antara rukun dan syarat adalah bahwa rukun itu masuk dan berada didalam ritual ibadah itu sendiri. Sedangkan syarat, tidak

³⁵ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009) , 23.

termasuk kedalam ritual ibadah posisinya terletak sebelum ritual ibadah.³⁶

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus ditiadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada dalam hakikat dan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah suatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada berkaitan dengan rukun, dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteia dari unsur-unsur rukun.

Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam perkawinan adalah : akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan hanafiyah hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh kedua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti saksi dan mahar dikelompokkan ke dalam syarat perkawinan.

³⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), 91.

Unsur pokok perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan perkawinan dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya perkawinan itu. Berdasarkan uraian tersebut rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a) Calon mempelai laki-laki
- b) Calon mempelai perempuan
- c) Wali dari pihak perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d) Dua orang saksi
- e) *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *Qobul* yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada disetiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak harus diserahkan pada saat akad perkawinan berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan, namun dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus sudah diserahkan.³⁷

3. Pernikahan Yang Diharamkan

A. Pernikahan Yang Diharamkan

Telah dijelaskan bahwa rukun dan syarat perkawinan harus dipenuhi, apabila salah satu di antara rukun-rukun tidak terpenuhi maka perkawinan itu dinyatakan tidak sah, bila yang tidak terpenuhi itu adalah salah satu syarat yang terdapat pada rukun, maka perkawinan itu termasuk perkawinan yang *fasid* dan dengan sendirinya hukumnya haram atau terlarang. Tentang kesahan perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Terdapat pula beberapa perkawinan yang dilarang, di antaranya:

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*), 81.

1. Nikah *Mut'ah*

a. Pengertian

Kata *Mut'ah* adalah termasuk dari kata bahasa arab yang berasal dari kata *ma-ta-'a* yang secara etimologi mengandung beberapa arti yaitu kesenangan, alat perlengkapan, pemberian.

Nikah *Mut'ah* dalam istilah hukum bisa disebut “perkawinan masa tertentu” dalam perkawinan yaitu seorang laki-laki mengawini seorang perempuan untuk waktu tertentu, misalnya sebulan, atau dua bulan, sehari atau dua hari setelah itu ditinggalkan setelah ia dapat melampiaskan nafsunya.³⁸

Nikah *Mut'ah* saat ini masih dijalankan oleh umat Syiah Imamiyah yang tersebar di Iran dan sebagian Iraq. Nikah *Mut'ah* juga disebut dengan *nkah Munqati'*. Sedangkan perkawinan biasa yang tidak disebutkan batas masanya disebut *nikah Daim*.

Dari segi rukun nikah tidak ada yang dilanggar dalam nikah *Mut'ah*, namun dari segi persyaratannya ada yang tidak terpenuhi, yaitu masa tertentu bagi umur perkawinan, sedangkan tidak adanya batas masa perkawinan merupakan salah satu dari syarat akad. Perbedaanya lainnya adalah tidak ada batas wanita yang dinikahi dalam nikah *Mut'ah*, sedangkan dalam perkawinan biasa dibatasi hanya empat dengan syarat dapat berlaku adil.

b. Hukum nikah *Mut'ah*

Nikah *Mut'ah* pernah terjadi dan di syariatkan dikalangan umat Islam dan mempunyai

³⁸ Ash-shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam I*, Terjemahan Mu'amal Hamidy dan Imron A. Manan (Surabaya: PT Bina Ilmu, 19930), 394.

landasan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi, sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 24

..... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

....

“...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban;...”(QS. Surat An-nisa (4) : 24)

Zahir ayat tersebut menjelaskan *Mut'ah* yang dilakukan dan imbalanya dalam berbentuk mahar yang menjadi dasar adanya syari'at *Mut'ah*. Dasar hukum dalam sunnah Nabi diantaranya sebagaimana terdapat dalam Hadis dari Salamah bin Al-Akwa' yang diriwayatkan Muslim yang mengatakan:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أُوطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. ثُمَّ نَهَى عَنْهَا (رواه مسلم)

“Dari Salamah bin Akwa', ia berkata, Rasulullah pernah memberikan keringanan pada tahun authas untuk melakukan *Mut'ah* selama 3 hari, kemudian Nabi melarangnya” (HR. Muslim)³⁹

Terdapat pula sebuah hadist dari Ali yang bunyinya

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُتْعَةِ عَامَ خَبِيرٍ (متفق عليه)

³⁹ Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, 408.

“Dari Ali RA bahwasanya Rasulullah SAW melarang nikah mut’ah pada saat perang khaibar” (Muttawafaqun Alaih)⁴⁰

Yang disebut degan tahun-tahun *Authas* adalah dalam hadis diatas adalah waktu perang Khaibar, Umrah Qadha, tahun memasuki Mekkah, perang Tabuk, dan waktu Haji wada’.

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadis diatas ulama sepakat bahwa memang telah dibolehkan oleh Nabi dan telah terjadi secara kenyataan perkawinan *Mut’ah* tersebut pada waktu tertentu. Namun dalam kebolehnya waktu ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama Ahlusunnah dengan Syiah Imamiyah.

Menurut jumhur ulama Ahlul Sunnah bahwa kebolehan nikah *Mut’ah* itu sudah dicabut dengan arti sekarang hukumnya telah Haram. Ualama Syiah berpendapat bahwa tidak ada Hadis Nabi yang shahih yang mencabut kebolehan itu, dengan arti masih boleh hukumnya sampai sekarang.

2. Nikah *Tahlil*

1. Pengertian

Secara etimoogi *Tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan dengan perkawinan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram untuk melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang menyebabkan kehalalan tersebut disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan perkawinan disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan *muhallil* disebut *muhallalah*.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, 409.

⁴¹ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* ,105.

Nikah *Tahlil* dengan demikian adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali ke istrinya dengan perkawinan baru.

Bila seseorang menceraikan isterinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau beda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah lagi dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan habis masa iddah nya. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ



“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”(QS. Al-baqarah (2) : 230).

Yang dimaksud menikah dengan laki-laki lain dalam ayat tersebut bukan hanya sekedar

melakukan akad nikah, tetapi lebih jauh telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi dari ‘Aisyah Ra :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا الطَّلَاقَ الثَّلَاثَةَ فَتَزَوَّجْتُ آخَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا [أَيْ : لَا يَجَامِعُهَا ، وَفَهُم الرِّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا تَرِيدُ أَنْ تَعُودَ لِرِفَاعَةَ] فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Aisyah RA Bahwa Rifa’ah al Quradhi telah menikahi seorang wanita kemudian dia menceraikan istrinya tiga kali kemudian dia dikawini oleh suami kedua; kemudian dia menalak nya sebelum digaulinya. Suami pertama ingin kembali mengawini perempuan tersebut dan bertanya kepada Nabi Salallahu ‘Alaihi Wasallam, tentang itu nabi berdabda: tidak boleh,sampai suami kedua merasakan enaknya bergaul yang dirasakan suami pertama” (Muttafaqun ‘Alaih)⁴²

Suami kedua yang telah mengawini perempuan itu secara biasa dan kemudian menceraikanya dengan cara biasa sehingga suami pertama boleh mengawini kembali perempuan itu sebenarnya dapat disebut *Muhallil*. Namun tidak diperkatakan dalam hal ini, karena perkawinannya telah berlangsung secara alamiah dan secara hukum.

Perkawinan *tahlil* biasanya dalam bentuk persyaratan yang dilakukan sebelum akad atau

⁴² Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, terjemah Muhammad Ahsan, 511.

syarat itu disebutkan dalam ucapan akad seperti : “saya kawinkan engkau kepadanya sampai batas waktu engkau menggaulinya” atau “ saya kawinkan engkau engan syarat setelah engkau menghalalkannya tidak ada perkawinan sesudah itu” atau “saya kawinkan engkau kepadanya dengan ketentuan setelah engkau menghalalkannya segera menalaknya”. Dalam bentuk ini perkawinan *tahlil* perkawinan akad bersyarat.

Perkawinan *tahlil* ini tidak menyalahi rukun yang telah ditetapkan; namun karena niat orang yang mengawini itu tidak ikhlas dan tidak untuk maksud sebenarnya, perkawinan ini dilarang oleh nabi dan pelakunya, baik laki-laki yang menyuruh kawin atau laki-laki yang menjadi penghalal dilaknat oleh Rasulullah. Hal ini terdapat dalam hadis dari Ibn Mas’ud yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Nasai, dan Tarmizi dan dikeluarkan oleh empat perawi selain annasai yang bunyinya:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحْلَلَّ
لَهُ (رواه احمد، انساى، ترمذ)

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat muhallil (yang menghalalkan) dan orang yang dihalalkannya” (HR. Ahmad, Annasa’I, Tirmidzi)⁴³

2. Hukum Nikah *Tahlil*

Ulama sepakat menyatakan bahwa perkawinan *tahlil* itu hukumnya haram, Karena suatu yang dilaknat pelakunya adalah suatu yang diharamkan. Tentang bagaimana status hukum dari perkawinan *Tahlil* kebanyakan ulama

⁴³ Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, 410.

berpendapat bahwa perkawinan *tahli* itu batal atau fasid baik ditinjau dari segi adanya larangan dan laknat bagi pelakunya, mau adanya kesalahan dalam akad, yaitu menggunakan syarat.⁴⁴

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat ditinjau dari segi nikahnya sendiri sebenarnya sah, tetapi karena syarat yang terdapat dalam akad itu, maka yang batal syaratnya saja dengan arti yang berlangsung adalah perkawinan biasa.
- 2) Menurut Ima Syafii nikah *tahlil* dalam bentuk pertama dan kedua tidak sah, namun dalam bentuk ketiga ada ucapan imam Syafi'i yang mengesahkan. Apabila persyaraan itu dilakukan sebelum akad perkawinan tapi tidak disebutkan dalam rumusan akad, kecuali hanya diniatkan saja kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang demikian juga disebut nikah *tahlil*. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I berpendapat perkawinan tersebut adalah sah karena dalam akad perkawina tidak terdapat adanya persyaratan. Akad perkawina hanya batal dengan apa yang disyaratkan dan tidak dengan apa yang diniatkan.
- 3) Ulama Hanbaliyah tetap bertahan dengan pendapatnya yang mengatakan perkawinan walaupun tanpa disertai syarat, yaitu pernikahan yang dilakukan untuk membuatnya kembali halal untuk dinikahi oleh suami pertamanya adalah sebuah pernikahan yang haram, batil, dan batal.⁴⁵

⁴⁴ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 106.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 9 cet.10*, 142.

3. Nikah Syighar

a. Pengertian

Kata *Syighar* yang berasal dari bahasa Arab secara arti kata berarti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing mengangkat kakinya waktu kencing.⁴⁶ Bila dihubungkan kepada kata nikah disebut ikah *syighar* mengandung arti yang tidak baik, dalam arti definitive ditemukan artinya dalam sebuah hadis Nabi dari Nafi' bin Ibnu Umar:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنِ الشَّغَارِ. وَ الشَّغَارُ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوَّجَهُ
ابْنَتَهُ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (متفق عليه)

*"Dari Nafi' dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Sedangkan nikah syighar itu ialah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut, dan keduanya tanpa mahar (Muttawafaqun Alaih)."*⁴⁷

Dalam bentuk perkawinan di atas yang menjadi maharnya adalah perbuatan mengawinkan anaknya kepada seseorang, dalam arti kehormatan anaknya telah dirasakan oleh orang yang mengawini itu.

b. Hukum Nikah Syighar

Ulama sepakat tentang keharaman hukum perkawinan *Syighar* karena jelas adanya larangan Nabi tersebut di atas dan Nabi pun menjelaskan illat hukumnya, yaitu tidak terdapat mahar dalam perkawinan

⁴⁶ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 107.

⁴⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, 500.

tersebut, sedangkan mahar itu merupakan salah satu syarat dalam perkawinan.⁴⁸

Tentang Sahnya perkawina *Syighar* terdapat beda pendapat dkalangan para ulama, perbedaan tersebut didasarkan pada dua pandangan:

- 1) tidak bolehnya perkawina *Syighar* itu di sebabkan oleh larangan itu sendiri. Setiap larangan menyebabkan tidak sahnya perbuatan yan dilarang itu kalau dikerjakan, bila larang itu mengenai perbuatan itu sendiri. Berdasarkan pandangan ini perkawinan *Syighar* termasuk kedalam perkawinan yang tidak sah, jumbuh ulama berpendapat seperti ini.
- 2) Dilarangnya perkawinan *Syighar* tersebut karena alasan yang terdapat didalamnya, yaitu tidak terdapat padanya mahar. Berdasarkan pandangan ini maka yang tidak sah dalam perkawinan tersebut adalah maharnya, bukan perkawinan itu sendiri yang sudah terpenuhi rukunya. Bila maharnya tidak sah maka maharnya diganti sebagai mahar mitsl.⁴⁹

4. Perempuan yang haram untuk dinikahi

1. Mahram *muabbad*

Mahram *muabbad*, adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Diantara mahram *muabbad* ada yang sudah disepakati dan ada juga yang masih menjadi perselisihan. Mahram *muabbad* yang telah disepakati diantaranya:

⁴⁸ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 108.

⁴⁹ *Ibid*, 109.

- a. Larangan pernikahan karena hubungan kekerabatan (nasab)

Perempuan yang haram untuk dinikahi laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kerabat atau nasab yaitu Ibu, anak, saudara-saudara Ibu, saudara-saudara Ayah, anak dari saudara laki-laki, dan anak dari saudara perempuan. Larangan pernikahan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

“...diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan;.”

- b. Larangan pernikahan karena adanya hubungan pernikahan

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena adanya hubungan mushaharah adalah segai berikut:

- 1) Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah tiri
- 2) Perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki atau menantu
- 3) Ibu istri atau mertua
- 4) Anak dari istri dengan ketentuan istri telah digauli

Keharaman ini telah di tentukan dengan kelanjutan ayat 23 surat An-Nissa' sebagai berikut:

وَأُمِّهُتُ نِسَابُكُمْ وَرَبَابُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نَّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ⁵⁰ وَحَلَائِلُ أَبْنَانِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“...ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)...”

c. Larangan pernikahan karena hubungan sesusuan

Hubungan sesusuan membuat orang menjadi mempunyai hubungan kekeluargaan yang sedemikian dekat. Mereka yang memiliki hubungan sesusuan itu telah menjadi saudara dalam pengertian hukum perkawinan ini, dan disebut saudara sepersusuan. Tetapi untuk pendekatan ke dalam saudara sesusuan itu tidak menjadikannya hubungan saudara sedarah untuk terjadinya saling mewarisi karena sedarah dalam hukum kewarisan.⁵⁰

Larangan menikah karena hubungan sesusuan berdasarkan pada surah An-Nissa ayat 23 sebagai berikut:

...وَأُمَّهُنَّ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ...

“...Diharamkan atas kamu mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan...”

2. Mahram Ghairu Muabbad

Mahram *ghairu muabbad*, adalah larangan menikah hanya untuk sementara waktu yang disebabkan oleh hal-hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan

⁵⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta. Yayasan Penerbit UI, 1974), 53.

tersebut sudah tidak berlaku lagi. Larangan pernikahan sementara itu berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Menikahi dua orang saudara dalam satu masa

Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu pernikahan itu disebutkan dalam lanjutan surah An-Nissa ayat 23 sebagai berikut:

...وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ...

“...Dandiharamkan atas kamu menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara...”

- b. Poligami diluar batas

Seorang laki-laki didalam melakukan poligami paling banyak hanya menikahi empat wanita saja dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan habis pula masa iddahnya. Dengan begitu wanita kelima itu haram hukumnya dinikahi dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang diantara istrinya yang berempat itu belum diceraikannya.

- c. Larangan karena ikatan pernikahan

Seorang perempuan yang sedang dalam ikatan pernikahan haram dinikahi oleh siapapun. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum diceraikannya perempuan itu oleh suaminya. Setelah suaminya meninggal atau telah diceraikannya perempuan itu maka iperempuan itu boleh dinikahi.

Keharaman menikahi perempuan bersuami itu terdapat pada surah An-Nissa ayat 24 sebagai berikut:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“....dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...”

d. Larangan karena talak tiga

Wanita yang sudah ditalak tiga haram menikah lagi dengan suaminya, kecuali kalau wanita itu sudah menikah lagi dengan orang lain dan telah digauli serta telah diceraikan lagi oleh suami terakhirnya itu dan telah habis masa iddah-nya. Sesuai dengan firman Allah SWT berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ

طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ

اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS.Al-Baqarah 230).

e. Larangan karena ihram

Perempuan yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun haji tidak boleh dinikahi, karna ketika sedang melakukan ihram tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin Affan sebagai berikut:

عن عثمان لنبى صلى الله عليه وسلم قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

“saya mendengar Ustman bin Affan berkata: Rasulullah SAW bersabda: Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang (diriwayatkan Muslim dari Ustman bin Affan).”⁵¹

f. Larangan karena beda agama

Yang dimaksud dengan beda agama disini adalah wanita muslimah dengan laki laki non muslim dan sebaliknya. Dalam istilah fiqh disebutkan dengan menikahi orang kafir. Keharaman wanita muslimah menikahi lelaki kafir dan lelaki muslim menikahi wanita kafir terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik

⁵¹ Hadist Muslim No.2522

hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Hadits terkait dengan artinya sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ

“Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.” (HR. Bukhari Muslim).⁵²

5. Tujuan dan Hikmah menikah

Allah SWT mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena ada beberapa nilai yang tinggi dan ada beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah menberkati syari’at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Demikian Allah SWT juga menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu juga tumbuhan dan lai sebagainya. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, dua sejioli, hidup sami isteri, dan membangun rumahtanga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang

⁵² Ma’ruf Mu,in dkk, *Himpunan fatwa MUI sejak tahun 1975*, (Jakarta:Erlangga,2011), 481.

tak mungkin putus dan diputuskanya ikatan akad nikah atau ijab Kabul.⁵³

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang relevan sebagai dasar dari tujuan perkawinan diantaranya dalam suat Ar-Ruum ayat 21 yang mengandung arti tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga Sakinah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Ruum: 21)

Dalam ayat lain diterangkan pula tujuan dari perkawinan adalah untuk regenerasi atau memiliki keturunan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 39.

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS An-Nisa: 1)

Tujuan lain dari perkawinan berdasarkan Hadist Rasulullah adalah untuk mengikuti Sunnah nya sesuai dengan hadist dari Anas bin Malik yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: لِكُنْيِ أَنْ أُولِيَّ وَأَنَا، وَأَصُومُ وَأُفْتِرُ، فَمَنْزَعٌ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه)

“Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW memuji dan menyanjung Allah lalu beliau bersabda, akan tetapi akupun melakukan Sholat dan tidur, berpuasa dan berbuka, serta menikahi wanita. Maka siapa yang membenci sunnahku dia bukan termasuk golonganku” (Muttafaqun ‘Alaih)⁵⁴

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 : “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*”.⁵⁵

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebenarnya masih ada banyak tujuan perkawinan lainnya juga menjadikan harapan setiap pasangan suami istri, diantaranya:

⁵⁴ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, 309.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2.

1. Menyempurnakan Akhlak
2. Menyempurnakan pelaksanaan agama
3. Melahirkan keturunan yang mulia
4. Menciptakan kesehatan dalam diri secara fisik maupun non fisik
5. Menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru.⁵⁶

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah perkawinan itu ada 4 hal, yaitu:

1. Memeperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan sasku-suku bangsa
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia
3. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama darimasyarakat yang besar di atas kecintaan dan kasih sayang
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki pengidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab⁵⁷

Menurut Ali Hasan tujuan perkawinan ialah

1. Menentramkan jiwa

Bila sudah terjadi akad nikah, wanita merasa jiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Begitu pula suami merasa tentram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumahtangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam berbagai peroaalan hidup.

⁵⁶ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya* (Jakarta: Visimedia, 2007), 9.

⁵⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Suatu Analisis dari Undang-Undang N0.1 Tahun1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 27.

2. Mewujudkan (melestarikan) keturunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan. Semua manusia merasa gelisah apabila perkawinannya tidak menghasilkan keturunan. Rumahtangga terasa sepi karena pada umumnya orang rela bekerja keras untuk kepentingan keluar anak dan cucunya.

3. Latihan memikul tanggung jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, maka latihan memikul tanggung jawab sangat penting. Hal ini berarti bahwa perkawinan berarti pelajaran dan latihan preaktif bagi pemikul tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Dari beberapa penjabaran tujuan perkawinan diatas, maka semuanya sangatlah penting. Tujuan perkawinan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang agar keberlangsungan hidup rumahtangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Hikmah perkawinan pada semua makhluk hidup adalah sebagai penjelasan bahwa Allah SWT itu benar (Haq) dan sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, itulah hikmah paling agung.⁵⁸ Adapun hikmah langsung yang dirasakan oleh orang yang menikah dan dibuktikan secara ilmiah:

1. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab menikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan

⁵⁸ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung : RemajaRosdakarya, 1991), 6.

hasrat dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks suatu yang kotor.

2. Motivator kerja keras

Tidak sedikit pemuda yang dulunya hidup santai dan malas-malasan serta berlaku boros karena merasa tidak punya beban tanggung jawab, ketika akan dan sudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala keluarga serta keinginan untuk mebahagiakan seluruh anggota keluarga.

3. Bebas fitnah

Hikmah nikah yang tidak kalah penting dalam aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seorang yang telah menikah dari fitnah, fitnah disini berarti sebagai fitnah sebagai ujian diri sendiri dari gejala nafsu yang mebara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari oranglain.⁵⁹

B. Pernikahan Dalam Adat Jawa

1. Pengertian Pernikahan dalam Adat Jawa

Masyarakat tradisional Jawa mempunyai tata cara yang lengkap dalam melangsungkan sebuah tradisi pernikahan.⁶⁰ Pernikahan menurut masyarakat adat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yaitu perempuan dan laki-laki. Pepatah Jawa mengatakan

⁵⁹ Ending Mintarja, *Menikah denganku Atas Nama Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), 82

⁶⁰ Bayu Adi Pratama, Novita Wahyuningsih "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan Kec Bayat Kab Klaten" *Haluan Sastra Budaya*, vol 2 no.1 Juni 2018, 1-22.

“tresno jalaran soko kulino” yang artinya adalah cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa.⁶¹

Pernikahan ideal menurut masyarakat adat Jawa ialah suatu bentuk pernikahan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk pernikahan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Seseorang yang akan melangsungkan hajat pernikahan memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pemilihan jodoh, pertimbangan ini juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep bibit, bobot, bebet dalam membina hubungan suami istri.⁶²

Bagi penduduk jawa terutama mereka yang masih memegang teguh adat jawa, peranan orang tua dalam aktifitas pernikahan itu tidak dapat ditinggalkan. Dalam menentukan jodoh untuk anak-anaknya yang sudah remaja, segala sesuatunya mereka perhitungkan melalui konsepsi-konsepsi adat yang berlaku di dalam masyarakatnya. Dasar yang dipakai oleh orang tua untuk menentukan atau memilih jodoh anak-anaknya pada umumnya merupakan pantangan-pantangan atau larangan-larangan menikah.⁶³

Pantangan atau larangan dalam masyarakat Jawa ini seperti sudah menjadi hukum adat yang berlaku di masyarakat, sehingga orang tua sangat mengupayakan untuk selalu melakukan hukum adat tersebut. Jika tidak melakukan hal tersebut maka akan mendapat sanksi sosial dalam kehidupan

⁶¹ Ririn Mas'udah, "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggelek". Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 1, No. 1. (2010), 01-120.

⁶² SuwardiEndraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Cakrawala: Tangerang, 2003), 114.

⁶³ KusulKholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam", Jurnal USRATUNA, Vol. 1, No. 2.(Juli 2018), 1-26.

bermasyarakat, seperti di cemoooh atau menjadi bahan gunjingan masyarakat setempat.

2. Larangan/ Pantangan Menikah dalam Tradisi Jawa

a. Menikah di Bulan Syuro/ Muharram

Bagi masyarakat Islam-Jawa, bulan Syuro sebagai bulan keramat sehingga menimbulkan kepercayaan bahwa bentuk-bentuk kegiatan tertentu seperti pernikahan, hajatan, dan sebagainya tidak berani melakukan, bukan berarti tidak boleh. Akan tetapi masyarakat Islam-Jawa memiliki anggapan bahwa bulan Syuro/ Muharram itu merupakan bulan yang paling agung dan termulia, sebaga bulan (milik) Gusti Allah. Karena terlalu memuliakan bulan Syuro ini maka dalam sistem kepercayaan masyarakat, dipercayai hamba atau manusia “tidak kuat” atau memandang “terlalu lemah” untuk menyelenggarakan hajatan pada bulan Allah itu.⁶⁴

Bagi masyarakat Jawa, hamba atau manusia yang “kuat” untuk melaksanakan hajatan pada bulan itu hanyalah raja atau sultan. Sehingga bulan Syuro ini dianggap sebagai bulan hajatan bagi keraton, di mana rakyat biasa akan “kualat” jika ikut-ikutan melaksanakan hajatan tertentu. Sementara bagi masyarakat Islam-Jawa, sultan dipandang sebagai “wakil Allah” (khalifatullah) di muka bumi. Maka gelar sultan ini dianggap sebagai simbol perilaku agung, sehingga disebut ngarso dalem (yang di depan anda) atau sampeyan dalem (kaki anda), dimana rakyat memiliki posisi di bawah sultan.

⁶⁴ K. H. Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: NARASI, 2009), 84.

b. Posisi Rumah Berhadapan

Posisi rumah yang berhadapan menjadi permasalahan bagi calon pasangan yang akan menikah dalam adat Jawa. Masyarakat Jawa meyakini jika pernikahan tetap dilaksanakan maka dalam pernikahannya mengalami musibah/ kesialan seperti kekurangan rezeki, atau salah satu keluarganya ada yang meninggal.

c. Pernikahan Anak Pertama dan Ketiga

Pernikahan anak pertama dengan anak ketiga dalam adat Jawa dipercayai bisa menimbulkan kesialan dalam perjalanan rumah tangga nantinya seperti bercerai, selalu mempunyai masalah yang berlarut-larut di dalam rumah tangganya. Oleh karena itu pernikahan seperti ini dilarang atau menjadi sebuah pantangan dalam masyarakat adat Jawa.⁶⁵

d. Pernikahan dari saudara-saudara misan

Orang Jawa menyebutkan dengan istilah sedulur misan (tunggal mbah buyut), yaitu angkatan 4 ke bawah. Bila calon jodoh berasal dari kelompok saudara ipar, orang Jawa menyebutnya istilah krambil sejengang. Menurut anggapan, pantangan itu bila dilanggar akan mengakibatkan salah satu diantara mereka meninggal.

e. Wetonan

Bila calon jodoh itu tidak sesuai dengan hari kelahirannya, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *neptune ora cocok* (neptunya tidak cocok). mempermasalahkan *wetonan* (persamaan hari) yang dimaksud persamaan hari di sini adalah persamaan hari lahir antara calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan dan atau calon wali dari

⁶⁵ Firda Rahma, “Mengetahui Larangan Pernikahan dalam Tradisi Jawa”, (On-line), tersedia di: <http://travellingyuk.com/larangan-pernikahan-dalam-tradisi-jawa/227480> (19 Februari 2020).

mempelai perempuan.⁶⁶ Adapun istilah *neptu* berasal dari kata-kata yang berarti sesuai atau tidak sesuai. Maka perjodohan diantara mereka dapat digagalkan, karena memungkinkan hidup suami istri itu tidak bahagia. Di antara langkah-langkah yang dilakukan dalam menghitungnya adalah: *pertama*, menghitung jumlah neptu (hari kelahiran) calon pengantin wanita ditambah jumlah hari kelahiran calon pengantin laki-laki dibagi 5. *Kedua*, menggunakan perhitungan hari kelahiran laki-laki dan wanita dan aksara Jawa.

f. *Sedulur pancer wali* atau *pancer lanang*

Bila calon itu (anak gadis) anak saudara laki-laki ayah, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *sedulur pancer*.⁶⁷ Tradisi larangan menikah ini sangatlah kental dalam masyarakat adat Jawa, mereka tidak berani melanggar larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian, kematian dan sebagainya. Sehingga penundaan bahkan pembatalan pernikahan menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam hal ini, pihak calon pasangan suami istri sangat dikecewakan akan adanya pembatalan tersebut sehingga tak jarang banyak yang frustrasi. Bukan karena ketidakcocokan lahir batin di antara mereka tetapi karena adanya semacam "rambu-rambu" larangan menikah yang sudah menjadi norma dalam masyarakat.⁶⁸

⁶⁶ Titin Mulya Sari, Abdur Rosyid, Romli, *PERKAWINAN ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA TERLANGU KECAMATAN BREBES*, AL Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol: 5 /No: 10 2017, 826.

⁶⁷ Ririn Mas'udah, "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek", 01-120.

⁶⁸ Miftahul Huda, "Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa", 383.

Adanya ketetapan-ketetapan yang dijadikan tradisi tersebut sangatlah bertentangan dengan Islam bahkan tidak ada ajaran Islam yang mengatur tentang larangan pernikahan berdasarkan tradisi adat, adapun larangan nikah dalam konteks Islam adalah larangan menikah karena nasab, sepersusuan dan karena ada hubungan pernikahanserta sebab syara' lainnya.

3. Tradisi Kepercayaan Masyarakat Adat Jawa

Tradisi merupakan kebiasaan yang terus dilakukan dari generasi ke generasi di dalam sebuah masyarakat. Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh namun bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga.⁶⁹

Suatu tradisi akan dipertahankan jika tradisi itu masih memiliki peran bagi kehidupan masyarakat, akan tetapi jika sudah tidak memiliki peran maka secara perlahan akan terkikis dan tergantikan oleh perubahan zaman. Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang.

Tradisi merupakan warisan masa lalu yang dilestarikan terus hingga sekarang, dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Kepercayaan merupakan sejumlah konsep abstrak yang di konstruksikan oleh setiap individu yang memberi makna pada lingkungan sosial, natural dan keagamaan. Seluruh kehidupan individu dikonstruksikan, diekspresikan, dan direkonstruksikan. Kepercayaan tidak menghasilkan tingkah laku secara langsung tetapi menetapkan seperangkat parameter yang digunakan individu untuk merespons kekuatan-kekuatan di lingkungan tersebut dan tindakan-tindakan orang lain.

⁶⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, Dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* Cet. 1, 82.

Kepercayaan keagamaan tidak hanya mengakui keberadaan benda-benda dan makhluk-makhluk sakral tetapi seringkali memperkuat dan mengokohkan keyakinan terhadapnya. Kepercayaan, mitos, dogma, dan legenda-legenda Jawa jelas merupakan representasi atau sistem representasi yang mengekspresikan hakikat hal-hal yang sakral, kebaikan dan kekuatan-kekuatan yang dihubungkan padanya, mitos-mitos Jawa pun ada yang dipandang sakral, bertuah, dan Jawa terkait dengan dunia magis, jelas bahwa keyakinan, spiritual atau agama Jawa tidak dapat di pisahkan dengan dunia magis.⁷⁰

Dalam budaya Jawa pra Islam yang bersumberkan dari ajaran agama Hindu terdapat kepercayaan tentang adanya para dewata seperti Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa serta masih banyak lagi para dewa. Seperti halnya kepercayaan kitab-kitab suci, orang-orang suci, roh-roh jahat, hukum karma dan hidup bahagia abadi. Pada agama primitif sebagai agama orang Jawa sebelum kedatangan agama Hindu atau Buddha, inti kepercayaannya adalah percaya kepada daya-daya kekuatan ghaib yang menempati pada benda (dinamisme), serta percaya kepada roh-roh ataupun makhluk-makhluk halus yang menempati suatu tempat atau benda, baik benda hidup ataupun benda mati (animisme).⁷¹

Kepercayaan-kepercayaan dari agama Hindu, Buddha ataupun animisme dan dinamisme berinterelasi dengan kepercayaan-kepercayaan Islam dalam proses perkembangan Islam. Sehingga pada prinsip ajaran tauhid Islam telah menyatu dengan berbagai unsur keyakinan Hindu-Budha ataupun kepercayaan primitif. Hal tersebut menjadikan timbul pemahaman baru di kalangan orang Jawa bahwa setiap gerakan, kekuatan, dan kejadian di alam ini disebabkan oleh makhluk-makhluk yang ada disekelilingnya.

⁷⁰ H. Suwardi Emdraswara, *Agama Jawa*, (Yogyakarta: Lembu Jawa, 2012), 33.

⁷¹ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 122.

Keyakinan semacam itu terus terpelihara dalam tradisi dan budaya Jawa, atau dalam kepustakaan budaya disebut “*Kejawen*”, yaitu keyakinan atau ritual campuran antara agama formal dengan keyakinan yang mengakar kuat di kalangan masyarakat Jawa. Sebagai contoh, banyak orang yang menganut agama Islam, tapi dalam praktik keberagamaannya tidak meninggalkan keyakinan warisan nenek moyang mereka. Hal itu bisa saja karena pengetahuan mereka yang dangkal terhadap Islam atau bisa juga memang berkat hasil pendalamannya terhadap keyakinan warisan tersebut dan Islam secara integral.

Para pengamat dan peneliti telah membuktikan bahwa orang Jawa memiliki kepercayaan yang beragam. Praktik keagamaan orang Islam banyak dipengaruhi oleh keyakinan lama yaitu animisme, Hindu, Buddha, maupun kepercayaan kepada alam yaitu dinamisme. Oleh karena itu masih ditemukan orang-orang yang berpedoman pada primbon (sistem perhitungan atau ramalan) dalam melakukan aktivitas tertentu.⁷² Ramalan adalah sejarah masa depan yang memainkan peran penting dalam historiografi, literatur utama dan tradisi keagamaan Jawa. Ramalan sangat mempengaruhi pola hidup orang Jawa dan dijadikan sebagai patokan (petunjuk) dalam menjalani kehidupan.

Ramalan ada yang berbentuk rajah, mantra, ataupun rapalan yang terdapat dalam primbon yaitu mengenai nasib baik dan buruk manusia dari lahir hingga ke liang lahat. Hitungan weton (tanggal lahir), dipercaya dapat mengetahui jenis watak dan keberuntungan manusia, termasuk di antaranya adalah ramalan menghitung waktu, apakah waktu tersebut sesuai dengan tanggal lahir seseorang atau tidak. Biasanya ramalan ini digunakan untuk menentukan musim bercocok tanam, hendak bepergian, hendak mengadakan jamuan pernikahan, atau mengetahui karakter dan kepribadian pasangan, hingga menentukan lokasi pembuatan sumur.⁷³

⁷² *Ibid.*, 46.

⁷³ Heny GustiniNuraeni, Muhamad Alfian, *Studi Budaya di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 176.

Ditengah modernisasi saat inipun masih banyak dari kalangan masyarakat adat Jawa yang menggunakan perhitungan ataupun ramalan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berkaitan dengan sisa-sisa kepercayaan animisme dan dinamisme, kepercayaan mengesakan Allah sering menjadi tidak murni karena tercampur dengan pemujaan terhadap benda-benda yang dianggap keramat. Arti keramat disini sebagai sesuatu yang sakral bersifat ilahiyah.

Dalam tradisi Jawa terdapat berbagai jenis benda yang dikeramatkan seperti azimat pusaka, tombak, keris, ikat kepala, cincin, batu akik, dan lain-lain dipandang memiliki barokah atau bisa membawa kesialan. Benda-benda ataupun orang yang dianggap keramat dipandang sebagai penghubung (wasilah) dengan Allah.⁷⁴

Kaitannya dengan ketentuan (takdir) baik atau buruk dari Tuhan, dalam budaya Jawa telah terpengaruh oleh teologi Jabariyah sehingga terdapat kecenderungan orang bersifat pasrah dan menerima terhadap ketentuan Allah. Meskipun demikian manusia mempunyai peluang untuk berikhtiar dengan kemampuan yang dimilikinya seperti berusaha dan berdoa kepada Allah, namun terdapat pula upaya-upaya ikhtiar yang diwarnai oleh nilai-nilai yang bersumber dari kepercayaan primitif.

Tempat-tempat yang baik, hari, bulan dan tahun perlu dicari dan ditentukan menggunakan cara-cara magis. Pada hari jelek atau hari na'as, sebaiknya orang tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti pernikahan, perjalanan jauh, transaksi dagang, dan lain-lain. Perhitungan magis dengan melihat neptu dari hari dan pasaran menurut rumus-rumus tertentu sangat menolong untuk mencari dan menentukan hari baik, bulan baik serta menghindari hari-hari na'as.

Namun jika hari na'as tidak dapat dihindari maka perlu diusahakan upacara-upacara tertentu untuk menetralsir akibat negatif yang ditimbulkan dari hari na'as tersebut. Dengan

⁷⁴ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, 124.

demikian, upacara tertentu memiliki kekuatan ghaib yang bersifat menangkal terhadap akibat buruk yang akan menimpa. Upacara-upacara dalam agama Hindu tampak sama yang diwujudkan dalam bentuk sesaji. Sesaji merupakan warisan dari budaya Hindu sedangkan doa merupakan inti ibadah dalam agama Islam. Keduanya menjadi tradisi di kalangan masyarakat Islam di Jawa.⁷⁵

Pola hidup orang Jawa yang kebanyakannya telah terbentuk oleh pemahaman mistis tersebut yaitu animisme dan dinamisme, sering menjadikan simbol sebagai satu-satunya media yang digunakan untuk memahami alam agar dapat menyatu dengan Tuhan. Setiap individu berbeda-beda dalam memahami simbol, bergantung pada latar belakang kemampuan seseorang dalam memahami simbol tersebut.⁷⁶

Simbol dalam filsafat Jawa tidak sekadar simbol, tetapi telah menjadi suatu ajaran atau doktrin yang harus diyakini. Bagi masyarakat Jawa, simbol merupakan media yang dapat menghantarkan manusia pada tujuan spiritualitas dirinya. Mereka meyakini bahwa keberadaan simbol itu sakral, sangat dibutuhkan, bahkan diharuskan. Mistisisme Jawa tidak berdasarkan doktrin tertentu, ia berproses berdasarkan pengalaman hidup masing-masing. Dalam kebudayaan Jawa, mistisisme menduduki tempat terhormat untuk waktu yang sangat panjang dan dalam praktiknya sudah populer jauh sebelum ajaran Hindu-Budha tiba di Pulau Jawa.

Merujuk pada pendapat Clifford Geertz, bahwa Geertz memilah masyarakat Jawa kedalam tiga golongan utama yaitu golongan santri, yang merupakan kalangan muslim ortodoks. Golongan priyayi yaitu kalangan bangsawan yang dipengaruhi oleh tradisi-tradisi Hindu-Jawa. Sedangkan golongan abangan yaitu masyarakat desa pemeluk animisme.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*, 125.

⁷⁶ Heny Gustiani, Muhamad Alfian, *Studi Budaya Di Indonesia*, 172.

⁷⁷ Mark R. Woodward, *Islam Jawa, Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*,

Geertz menyebut bahwa pandangan dunia Jawa adalah agama Jawa, baik sebagai agama abangan, agama santri, maupun agama priyayi, menurut lapisan-lapisan masyarakat. Suseno, menjelaskan bahwa dalam pandangan dunia Jawa ada empat lingkaran bermakna yaitu:

- a. Lingkaran pertama, lingkaran yang bersifat ekstrovert. Sikap terhadap dunia luar yang dialami sebagai kesatuan kepercayaan *ukhrowi* antara alam, masyarakat, dan alam adikodrati yang keramat, serta dilaksanakan dalam kegiatan ritual tanpa refleksi eksplisit terhadap dimensi batin sendiri (secara kental dan kuat dalam masyarakat desa). Geertz menyebutnya sebagai agama abangan.
- b. Lingkaran kedua, memuat penghayatan kekuasaan politik sebagai ungkapan alam *numinus* (*ukhrowi*, *adikodrati*).
- c. Lingkaran ketiga, berpusat pada pengalaman tentang keakuan sebagai jalan ke persatuan dengan Maha Kodrati. Unsur-unsur lingkaran pertama diterjemahkan ke dalam dimensi pengalaman kebatinan sendiri, dan sebaliknya, alam lahir distrukturisasikan dengan bertolak dari dimensi batin. Geertz menyebutnya sebagai agama priyayi. Puncak wujud ini adalah usaha untuk mencapai pengalaman mistik.
- d. Lingkaran keempat adalah penentuan semua lingkaran pengalaman oleh yang Ilahi, oleh takdir.⁷⁸

Secara sosial-ekonomis, masyarakat Jawa dibedakan dalam dua golongan, wong cilik (orang kecil) yaitu sebagian besar adalah petani dan mereka yang berpendapatan rendah, dan kaum priyayi, yaitu golongan pegawai dan orang-orang yang dianggap berpendidikan (kaum intelektual). Sementara atas dasar sosial-keagamaan masyarakat Jawa dikelompokkan ke dalam dua kelompok yang keduanya secara formal Islam, yaitu golongan santri dan abangan. Golongan santri memahami diri sebagai orang Islam dan berusaha memenuhi kualitas hidup sesuai ajaran Islam. Sedangkan golongan abangan atau disebut juga kejawen, yaitu kesadaran dan cara hidupnya lebih diwarnai

⁷⁸ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, 67.

oleh keyakinan dan tradisi pra-Islam.⁷⁹ Menurut Professor Veth, penganut Islam merupakan golongan terbesar di pulau Jawa tidak seluruhnya memeluk agama ini secara murni. Veth mengklasifikasi penganut Islam dalam empat kelompok yaitu:

- a. Penganut Islam yang masih memegang campuran kepercayaan Brahma dan Buddha.
- b. Penganut Islam yang mempunyai kepercayaan magik dan dualisme Penganut Islam yang memiliki kepercayaan animisme.
- c. Penganut Islam yang melaksanakan ajaran Islam secara murni.

Ketiga kelompok pertama diklasifikasikan dalam penganut kejawen, dan sampai saat ini ajaran kejawen masih banyak dianut oleh orang muslim Jawa.⁸⁰ Sehingga pada masyarakat muslim Jawa di dalam menjalankan agamanya, selain melakukan ibadah sebagai mana mestinya namun juga tidak menghilangkan kepercayaan kejawennya yang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu mereka tetap mempertahankan unsur-unsur tradisi Jawa tersebut. Ketika agama dilihat dan diperlakukan sebagai kebudayaan, yang terlihat adalah agama sebagai keyakinan yang ada dan hidup dalam masyarakat manusia, bukan agama yang terwujud sebagai petunjuk, larangan, dan perintah Tuhan yang ada didalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad.

Agama yang tertuangi dalam dua teks suci tersebut bersifat sakral dan universal, sedangkan keyakinan keagamaan yang hidup di masyarakat itu bersifat lokal, yaitu sesuai dengan kondisi, sejarah lingkunganhidup, dan kebudayaan masyarakatnya. Namun demikian, pemahaman hubungan antara budaya dengan agama tetap tidak bisa dipisahkan daripemahaman normatif agama itu sendiri, yaitu agama dalam bentuk larangan danperintah. Pemahaman normatif menjadi titik tolak untuk memahami bagaimana budaya memperkaya nilai normatif dan bagaimana nilai normatif dipraktikkan olehmasyarakat budaya.

Proses persentuhan Islam sebagai tradisi agung (great tradition) dengan kultur lokal (little tradition) tersebut ada

⁷⁹ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, 47.

⁸⁰ *Ibid*, 49.

memungkinkan terjadinya beberapagam variasi hubungan agama dengan budaya masyarakat. Great tradition atau tradisi besar adalah bentuk kepatuhan pada nilai-nilai atau sistem kekuasaan di atasnya. Tradisi besar bersifat ortodoks dan nilainya dianut secara universal juga dikenal dengan universalisasi. Sementara itu little tradition atau disebut juga tradisi kecil merupakan kebalikan dari tradisi besar. Ada kalanya persentuhan budaya itu melahirkan penolakan, akulturasi, atau asimilasi.

C. Adat Istiadat ('Urf) Dalam Hukum Islam

1. Pengertian

Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata “adat” di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat”, dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja.⁸¹

Adapun yang dikehendaki dengan kata adat dalam karya ilmiah ini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan adat saja. Dalam literatur Islam, adat disebut العادة atau العرف yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahâb Khalâf *urf* adalah:

الْعُرْفُ هُوَ مَا عَارَفَهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَ تَسْمَى الْعَادَةُ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

*“ Al-‘urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-‘âdah. Dalam bahasa ahli syara” tidak ada perbedaan antara al-‘urf dan al-‘âdah.”*⁸²

⁸¹ Ensiklopedi Islam, Jilid I (Cet.3; Jakarta:PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 21.

⁸² Abdul Wahâb Khalâf, „Ilmu Ushûl al-Fiqih (Cet. 12;tt: Al-Nashr Wal-Tauzîk, 1978/1398), 89.

Al-âdah Menurut Al-Jurjânîy yang dikutip oleh Abdul Mudjib, *al-adah* adalah:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَ عَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

“*Al-‘adah* adalah suatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya secara terus-menerus”.⁸³

Memperhatikan definisi-definisi di atas, dan juga definisi yang diberikan oleh ulama-ulama yang lain, dapat dipahami bahwa *Al-‘Urf* dan *Al-‘Âdah* adalah searti, yang mungkin serupa perbuatan atau perkataan. Dan secara sederhana dapat dipahami bahwa adat harus:

- a. Diketahui banyak orang atau harus memasyarakat.
 - b. Diamalkan secara terus menerus dan berulang
2. Macam-macam Adat(*‘Urf*)

Menurut Al-Zarqa⁸⁴ yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *‘Urf* (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam:

- a. Dari segi obyeknya *‘urf* (adat istiadat) dibagi pada *al-‘urf al-lafzhî* (adat istiadat/ kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-urf al-amali* (adat sitiadat/ kebiasaan yang berbetuk perbuatan).

1) *Al-‘urf al-lafzhî* (العرف اللفظي)

adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

2) *Al-‘urf al-amali* (العرف العملي)

adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan

⁸³ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Cet. 3; Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 44.

mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

- b. Dari segi cakupannya, *‘urf* dibagi dua, yaitu *al-‘urf al-‘âm* (adat yang bersifat umum) dan *al-‘urf al-khâsh* (adat yang bersifat khusus).
 - 1) *Al-‘urf al-‘âm* (العرف العام) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
 - 2) *Al-‘urf al-khâsh* (العرف الخاص) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara“, *‘urf* dibagi dua yaitu: *al-‘urf al-shâhih* (adat yang dianggap sah) dan *al-‘urf al-fâsid* (adat yang dianggap rusak).
 - 1) *Al-‘urf al-shâhih* (العرف الصحيح) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nâsh (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
 - 2) *Al-‘urf al-fâsid* (العرف الفاسد) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara“ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara“.

3. Kehujjahan Adat (*‘Urf*) dan Peranannya Dalam Hukum Islam

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *al-‘urf al-shâhih* baik yang menyangkut *al-‘urf al-lafzhî*, *al-‘urf al-‘amali* maupun menyangkut *al-‘urf al-‘âmdan* *al-‘urf al-khâsh*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara.

Menurut Imam al-Qarafi (ahli fiqh Maliki) yang dikutip oleh Harun Nasroen menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.

Dengan mengutip pendapat Imam al-Syathibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan Ibn Qayyim al-Jauzi (ahli ushul fiqh Hanbali) Nasrun Haroen juga menyatakan bahwa seluruh ulama

mazhab menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara dalam menetapkan hukum apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum masalah yang sedang dihadapi.⁸⁴ Misalnya, seseorang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia di dalam kamar mandi dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti itu telah berlaku luas ditengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini alasan mereka adalah adat perbuatan yang berlaku.

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa adat (*'urf*) merupakan sumber hukum yang diambil oleh Mazhab Hanafi dan Maliki dan sesungguhnya perbedaan diantara para fuqaha adalah perbedaan adat dimana mereka hidup.⁸⁵ Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, diataranya adalah:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ مَا لَمْ يُقْلَفُ النَّصُّ

*“Adat kebiasaan bisa dijadikan Hukum selama tidak bertentangan dengan nash”*⁸⁶

Adat bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berlaku secara umum
- b. Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. Tidak bertentangan dengan *nash*

⁸⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 142.

⁸⁵ Muhammad Abu Zahrah, *“Ushlhal-Fiqh”* diterjemahkan oleh Saefullah Ma’shum dkk dengan judul *Ushul Fiqh* (Cet.5; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 416.

⁸⁶ Sobhi Mahmassani, *Falsafat at-Tasyri’ fi al-Islâm*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet. ke- 1 (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1976). 262

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003).

Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2009).

Abdulaziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amza, 2009).

Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8:Perkawinan*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019).

Ash-shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam 1*, Terjemahan Mu'amal Hamidy dan Imron A. Manan (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993).

Ahmad Khalil, *Islam Jawa*, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa,
Abdul Wahâb Khalâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqih* (Cet. 12;tt: Al-Nashr Wal-Tauzîk, 1978).

Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Cet. 3; Jakarta: Kalam Mulia, 1999).

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatiif*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2001).

Data Profil Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus tahun 2021

Departemen Pendidikan Nasional,*Kamus Besar Bahasa indonesia Pusat Bahasa*,(Jakaeta:Gramedia Pustaka Utama,2011).

Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009)

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000).

Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang, Dina Utama,Cit. I,1993)

Ending Mintarja, *Menikah denganku Atas Nama Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2005).

Ensiklopedia Islam, Jilid I (Cet.3; Jakarta:PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999).

H. Suwardi Emdraswara, *Agama Jawa*, (Yogyakarta: Lembu Jawa, 2012).

Heny GustiniNuraeni, Muhamad Alfian, *Studi Budaya di Indonesia*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*,cet ke-4(Bandung Aditya Bakti, 1990).

Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya* (Jakarta: Visimedia, 2007).

Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, terjemah Izzudin Karimi (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014).

Imam an nawawi, *Shahih Muslim bi syarh An-Nawawi*, (jakarta: Pustaka Azzam,2011)

K. H. Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: NARASI, 2009).

Kartini Kartoni, *Pengantar metodologi Riset Sosial*,cet ke-VII, (Bandung:Mandar Maju, 1996).

Mughniyah, Muhammad Jawaz, *Fiqh Lima Mazhab*, terjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Alkahf , (Jakarta: Lentera, 2004).

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, terjemah Muhammad Ahsan

- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Suatu Analisis dari Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung : RemajaRosdakarya, 1991).
- Muhammad Abu Zahrah, “*Ushul-Fiqh*” diterjemahkan oleh Saefullah Ma’shum dkk dengan judul *Ushul Fiqh* (Cet.5; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999).
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* Cet. 1, (Depok, Raja Grafindo Perkasa, 2016).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Muhammad Isro’i, *Larangan menikah pada bulan muharram dalam adat jawa perspektif hukum islam*, (STAIN Salatiga)
- Mahmud Syaltut, *Al-Islam aqidat wa Syari’at*, Kairo: Dar al-Qalam, Cet III, 1966.
- Ma’ruf Mu’in dkk, *Himpunan fatwa MUI sejak tahun 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017)
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001).
- Sajuti thalib, *hukum kekeluargaan indonesia*, (jakarta: yayasan penerbit UI, 1974).
- Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Pres, 1993).

Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Syarah Riyadhhus Shalihin jilid II*, terjemahan Asmuni (Bekasi: PT Darul Falah, 2013).

SuwardiEndraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Cakrawala: Tangerang, 2003).

Soenarto Timoer, *Mitos Cura-Bhaya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010).

Sobhi Mahmassani, *Falsafat at-Tasyri' fi al-Islâm*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet. ke- 1 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 9 cet.10*, (Damaskus : Darul Fikr, 2007).

Wira Kurniawan, *Kawin Mulang Muakhi adat Lampung di Tinjau dari Hukum Islam*, (Metro: Perpustakaan IAIN Metro)

B. Jurnal

Bayu Adi Pratama, Novita Wahyuningsih "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan Kec Bayat Kab Klaten" *Haluan Sastra Budaya*, vol 2 no.1 Juni 2018.

KusulKholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Usratuna*, Vol. 1, No. 2. (Juli 2018).

Miftahul Huda, "Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa". Vol: 12 /No:2, 12 2017

Ramdan Fawzi "Aplikasi Kaidah Fiqh dalam Bidang Muamalah", *Amwaluna*, Vol 2, No 1. (Januari 2018).

Ririn Mas'udah, "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggelek". *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 1, No. 1. (2010).

Titin Mulya Sari, Abdur Rosyid, Romli, “*Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes*”, AL Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol: 5 /No: 10 2017

C. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Grapika press, 2012), 2

D. Wawancara

Dariyem, wawancara dengan masyarakat Desa Tanjung Jaya, 27 Mei 2021.

Dwi Santoso, wawancara dengan tokoh Agama Desa Tanjung Jaya, 30 Mei 2021.

Edi Mulyanto, wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Tanjung Jaya, 29 Mei 2021.

Mustajab, wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Tanjung Jaya, 28 Mei 2021.

Supangat, wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Tanjung Jaya, 29 Mei 2021.

Sumo Pawiro, wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Tanjung Jaya, 29 Mei 2021.

Sugianto, wawancara dengan tokoh Agama Desa Tanjung Jaya, 30 Mei 2021.

Tukiman, wawancara dengan tokoh adat Desa Tanjung jaya, 27 Mei 2021.